

Budaya dan Modernisasi: Pergulatan Orang Mentawai Dalam Memperkuat Identitas Budaya

Ade Irwandi¹, Ermayanti², Edi Indrizal³, Erwin⁴

¹Jagadditha Nawasena Nusantara
adeirwandi07@gmail.com

²Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Andalas
ermayanti@soc.unand.ac.id

³Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Andalas
ediindrizal@soc.unand.ac.id

⁴Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Andalas
erwin@soc.unand.ac.id

Corresponding author's email: adeirwandi07@gmail.com

Abstract

This study examines the Mentawai struggle to perform their cultural identity in the middle of hegemonic influence development and policies which contradicts their cultural identity and which gives rise to a cultural crisis. Critical anthropology's view shows that humans have the potential to create creativity and customisation. However, the Mentawai are limited and suppressed by social factors, cultural conditions, and exploited by the authorities. It means that the reality as Mentawai is not created by nature, but by humans, who have the power to manipulate the condition and patent the meaning that suits his own mind that is full of conflict, illusion, and distortion. Mentawai are in a 'false consciousness' that modernisation helps them to see the better world and have consciously stuttered (cultural backwardness) from that subconscious condition. Culture is deliberately clashed with modernisation in various elements of life such as in customs, language, food, and lifestyle. Furthermore, the generalization of development programmes also intervenes to sharpen the domination to narrow down the socio-cultural life of the Mentawai. However, they are not rigid. They practice cultural tactics (cultural meaning) in order to keep up with modernisation. They also consider modernisation and globalization as 'interaction spaces' in which the contestation of various elements of human life take place.

Keywords: Cultural Identity, Modernization, Mentawai, Struggle.

Pendahuluan

Masyarakat adat¹ di Indonesia mengalami

persentuhan dengan laju modernisasi dan mengalami pengaruh dampak dari

¹ Masyarakat adat atau *indigenous people* merupakan kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam

di wilayah adatnya. Selain itu, masyarakat adat juga memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, baik sebagian maupun seluruhnya (Dalidjo, 2021). Selain itu, Deklarasi Persatuan Bangsa-

persentuhan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari (Andalas, 2018; Aprianti dkk., 2022; Larasati, 2018; Mulyono, 2017; Putri, 2018; Suryandari, 2017; Susanto, 2018). Kehidupan mereka tidak terlepas dari proses perkembangan zaman yang semakin kompleks dan memberikan dampak yang signifikan pada sendi-sendi ruang kehidupan masyarakat adat. Namun, persentuhan antara masyarakat adat dan modernitas tidak sepenuhnya dapat diterima oleh sebagian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat adat perlahan-lahan tergerus oleh globalisasi², modernisasi, dan westernisasi³. Salah satu pengaruh modernisasi berasal dari program pembangunan (Jemadu, 2003).

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam praktik pembangunan pada masyarakat adat adalah modernisasi yang mengandalkan sebuah perubahan sosial agar sesuai dengan perkembangan dunia. Pendekatan ini lebih mengutamakan pemajuan ekonomi dan teknologi sebagai standar pemenuhan dan ciri khas dari masyarakat modern. Atas dasar itu, modernisasi mengesampingkan tradisionalisasi⁴ yang terdapat dalam masyarakat adat.

Ideologi modernisasi ini dilegitimasi dari teori evolusi yang lahir setelah Revolusi

Industri dan Revolusi Perancis (1789-1799). Teori evolusi menjelaskan bahwa masyarakat akan berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks. Comte (2009) menyebutkan 3 fase yang membuat evolusi sosial pada masyarakat, diantaranya fase teologis di mana masyarakat dikuasai oleh pendeta dan digerakkan nalar keagamaan; fase metafisik yaitu masyarakat digerakkan oleh pemikiran filosofisnya; dan terakhir fase ilmiah/positivis yaitu ketika masyarakat memahami hukum dan eksperimen ilmiah. Dengan kata lain, ideologi modernisasi mensyaratkan perubahan masyarakat yang selalu bersifat linear, dari masyarakat sederhana ke masyarakat modern (evolusi).

Penganut ideologi modernisasi secara arogan menempatkan kelompok yang digerakkan oleh nilai-nilai leluhur (seperti masyarakat adat) sebagai masyarakat yang berada di tahapan perkembangan paling dasar. Dengan demikian, masyarakat adat dipandang dan ditempatkan sebagai masyarakat ‘terbelakang’ yang perlu ditransformasikan menjadi ‘modern’. Sialnya, indikator ‘modern’ selalu merujuk pada peradaban Barat (eropa sentris) (Daraiseh, 2021). Dampaknya, pembangunan yang dilakukan selalu tidak

Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) menyatakan bahwa karakteristik penanda masyarakat adat antara lain adalah adanya identifikasi diri (*self-identification*); keberlanjutan sejarah (sebelum diinvasi oleh kekuatan penjajah atau kolonial); penduduk asal (sejarah); hubungan spiritual dengan tanah dan wilayah adat; identitas yang khas (bahasa, budaya, kepercayaan); serta sistem sosial, politik, dan ekonomi yang khas. Sementara itu, sebelumnya Konvensi ILO No. 169 atau Konvensi Masyarakat Adat 1989 menjadi instrumen internasional pertama yang mengakui masyarakat adat. Konvensi tentang masyarakat adat yang ditetapkan oleh negara-negara anggota Organisasi

Perburuan Internasional pada 1989 itu bertujuan untuk merevisi Konvensi ILO No. 107 (Konvensi Masyarakat Adat 1957). Prinsip utama konvensi tersebut adalah perlindungan terhadap masyarakat adat atas kebudayaan, gaya hidup, tradisi dan kebiasaan mereka (Dalidjo, 2021).

² Globalisasi seringkali dipandang sebagai unsur (*agent*) sekaligus bentuk dari *cultural imperialism* (Suryandari, 2017).

³ Modernisasi atau westernisasi dikaitkan dengan dominasi negara-negara barat dalam bentuk ekspansi produk termasuk bidang budaya (Larasati, 2018).

⁴ Keterikatan masyarakat terhadap paham budaya dan tradisinya.

sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai lokal masyarakat adat (identitas budaya⁵).

Masyarakat adat adalah salah satu komunitas yang selalu (dan terus akan) menjadi sasaran berbagai program pembangunan di Indonesia, baik itu program dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah (lihat juga IFC PS 7). Menurut Duncan (2008) program pembangunan yang menasar masyarakat adat atau *isolated tribe – isolated communities* mulai marak dilakukan sejak tahun 1970-an. Semenjak itu juga muncul kritik dan berbagai persoalan, tetapi proyek pembangunan itu terus berjalan hingga kini. Kritik yang dominan mengenai pendekatan pembangunan berbasis *top down* mengkritik bagaimana pembangunan merugikan serta memaksa masyarakat adat agar program pembangunan itu sukses (Lee, 2020). Namun, muncul pertanyaan apakah pembangunan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut? Suksesnya program pembangunan hanya diukur dengan kondisi statistik (Midgley, 1995). Namun, realitasnya nampak berbeda, tidak melulu pembangunan itu sukses dan disambut baik di tengah-tengah masyarakat. Di balik program pembangunan hanya bertendensi untuk menjalankan misi peradaban yang menganggap seolah-olah masyarakat adat tidak punya peradaban.

Sebuah contoh kegagalan pembangunan pada masyarakat adat dikupas dalam buku Tania M. Li yang berjudul *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice Politics* (2007) dan *Land's*

End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier (2014). Kedua buku ini memberikan gambaran kegagalan program pembangunan yang dilakukan pada masyarakat adat. Keduanya menjadi 'sekop' yang menyingkap sisi paradoks dari pembangunan sekaligus 'palu godam' yang memecahkan sejumlah anggapan bahwa pembangunan selalu tentang hal yang baik dan menyejahterakan. Menurut Fakih (2002) ideologi modernisasi yang dianut oleh gerakan pembangunan(isme) di Indonesia telah tiba di titik yang rapuh sekaligus mengerikan. Rapuh karena masih berpijak di paradigma yang telah usang; mengerikan karena membangun pandangan tunggal tentang kemajuan. Hal ini bisa kita lihat pada zaman orde baru yang mengarah pada kekuasaan pemerintahan pusat sebagai eksekusi kebijakan (*top-down*).

Hal ini dapat dilihat pada masyarakat adat Mentawai yang sejak tahun 1970-an menjadi sasaran empuk program pembangunan (Darmanto & Setyowati, 2012; Reeves, 1999; Satria, 2020). Hal ini didasari oleh anggapan bahwa masyarakat Mentawai masih berada dalam keadaan 'tertinggal' di Sumatera Barat⁶ (Bakker, 2007; Eindhoven, 2007, 2009; Hammons, 2010; Weintr , 2006) sehingga mereka perlu dibebaskan dari ketertinggalan menuju 'kemajuan'. Bentuk-bentuk program pembangunan yang menasar pada sendi-sendi kehidupan orang Mentawai berupa penghapusan kepercayaan lokal dan agenda budaya (Atsani dkk., 2021; Coronese, 1986; Delfi, 2012, 2013a; Glossanto, 2023; Ika, 2013;

⁵ Identitas budaya atau identitas kultural didefinisikan sebagai rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang kita ketahui batas-batasnya (*bonded*), tatkala dibandingkan dengan karakteristik kebudayaan orang lain (Liliweri, 2002, 2003; Putri, 2018; Suryandari, 2017).

⁶ Akan tetapi adanya dikotomi bahwa Mentawai di bagian selatan (Sikakap, Sipora dan pulau sebelah Selatan lebih maju dari pulau pulau di sebelah Utara) karena merupakan pusat kabupaten dan pusat ekonomi. Selain itu, para generasi muda Mentawai mulai berkembang untuk menuntut ilmu dan juga berusaha menjadi utusan politik dalam pemerintahan.

Islami dkk., 2023; Rozi & Taufik, 2020; Schefold, 1991; Sihombing, 1979; Yolanda & Willis, 2018; Yuniarto, 2021), pengelompokan masyarakat atau memukimkan dan mengumpulkan (Delfi, 2005; Habibah & Fauzi., 2021; Sabaggalet, 2023; Sabaggalet dkk., 2021; Schefold, 1985), penguasaan hutan dan lahan (Darmanto, 2011; Darmanto & Setyowati, 2012; Sulthani, 2019; Syafrudin & Telaumbanua, 2021), peralihan makanan (Azhari dkk., 2017; Darmanto, 2022, 2023; Delfi, 2011, 2018; Erwin, 2017; Erwin dkk., 2022, 2023; Irwandi & Saleleubaja, 2021; Mitra & Erwin, 2022; Persoon, 1992; Pradipta, 2019; Ridwan dkk., 2019; Saleleubaja, 2020, 2020; Samaloisa dkk., 2023), dan intervensi politik serta ekonomi (Delfi, 2013b; Delfi & Weintré, 2014a; Erwin, 2022; Rudito, 2013a; Sabaggalet, 2023; Samaloisa dkk., 2023; Schefold, 1998; Zakaria, 1996).

Webb Keane mengatakan bahwa sepanjang penduduk memahami diri mereka sendiri sebagai orang pinggir, orang lokal, atau orang daerah, maka itu adalah acuan yang paling benar, tepat, dan mendasar untuk menangkai pengaruh dari kelemahan diri mereka sendiri yaitu modernisasi (Kahn, 2016; Li, 2002). Merujuk pemikiran Keane, selama ini yang terbangun adalah pandangan bahwa masyarakat tradisional merupakan masyarakat minoritas (tidak dominan atau tidak dapat melaksanakan fungsi budayanya sendiri) dan dapat dikendalikan jika didefinisikan secara spasial dan sosial dalam keberagaman di Indonesia (Kahn, 2016).

Pucuk masalah terjadinya perubahan sosial budaya ini adalah masalah keterasingan (*alienation*). Mentawai diartikan dengan keadaan tidak berdaya, tidak bermakna, dan terpencil. Hal ini pulalah sumber dari

keterasingan yang diukur dari cara berproduksi masyarakat melalui cara-cara tradisional, berbeda dengan (Li, 2002, 2018) yang menyebut keterpinggiran sebagai konsep hubungan yang menyangkut suatu konstruksi sosial. Akibatnya, pada masyarakat Mentawai terjadi suatu proses tradisionalisasi atau kulturalisasi di mana, mereka selalu menjadi ‘citra’ bagi orang asing termasuk pemerintah pusat (Kahn, 2016). Maka persoalan pergulatan antara modernisasi dan tradisionalisasi yang dihadapi oleh orang Mentawai saat ini adalah masalah empiris yang berhubungan dengan klaim hegemoni yang melihat Mentawai tidak dengan kacamata sendiri (etnosentris). Mentawai harus dimaknai dengan cara-cara orang Mentawai, bukan dengan dengan cara lain yang dianggap paling benar atau paling tepat (relativisme kebudayaan). Di sinilah letak dualitas permasalahan antara modernisasi dan tradisionalisasi bagi orang Mentawai karena sifatnya mengekang (*constraining*) dan membebaskan (*enabling*).

Li (2002) berpesan bahwa niat hebat untuk memakmurkan rakyat sama sekali bukan jaminan bahwa kemakmuran tersebut akan terwujud. Jika kebudayaan merupakan suatu sikap kementawaian yang melekat (*imanan*) dan dimaknai sebagai jalan keseimbangan dalam kehidupan yang terdiri dari struktur, suprastruktur, dan infrastruktur untuk menciptakan keteguhan pada keberlangsungan hidup, maka strategi pembangunan tidak lagi diperlukan. Seyogianya, yang diharapkan oleh masyarakat Mentawai adalah sebuah siasat di mana mereka dapat bertahan dan menjadi ‘modern’ dengan tetap mempertahankan ketradisional mereka dan tidak ‘dipaksa’ untuk berubah. Inilah yang dinamakan dengan siasat kebudayaan, di mana modal-modal budaya dimanfaatkan sedemikian teratur untuk mencapai garis yang dianggap

mampu menjauhkan mereka dari masalah sosial yang menjadi ukuran dari pemerintah. ‘Membiarkan berbeda’ belum tentu membuat mereka (baca: orang Mentawai) tidak bahagia, karena ukuran filosofis dari pembangunan adalah sejauh mana program pembangunan tersebut membuat orang bahagia.

Kajian Pustaka

Seorang antropolog, A. Maass dalam tulisannya yang berjudul *Bei lebenswürdigen Wilden* pada tahun 1902 mempertanyakan konsep “*lebenswürdig*” atau orang liar yang ramah” dalam konteks masyarakat Mentawai. Pengetahuan yang dimiliki oleh Maass sebagai penjelajah pada kala itu tentu belum mencapai generasi menuju modern. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Maass dengan “orang-orang liar yang ramah”? Terlepas dari tafsiran yang disampaikan oleh (Schefold, 1991) yang mengatakan bahwa Maass merujuk itu untuk menyatakan mengenai persebaran asal dari bangsa yang tinggal di kepulauan Mentawai. Tentu hal itu tidak mudah dimaknai oleh segelintir orang, mengingat kata “liar” yang begitu tajam. Apa yang sebenarnya ingin dibenarkan dan apa yang ingin disalahkan (*judge*) oleh Maass dalam bukunya itu?

Pertama, Maass menggunakan kata pelunakan dari kalimat itu, bahwa dia mengurangi zat eropasentris-nya untuk menyatakan tentang kementawaian. Ini juga berlaku pada sejarah kata *barbarism*, *primitive*, aneh, dan kuno yang menjadi beradab, sederhana, tertinggal, dan terasing. Misalnya untuk menunjukkan suatu suku bangsa, seperti “Orang Kubu” dialihkan menjadi “Orang Rimba/Suku Anak Dalam (SAD/Luar)” yang nyatanya tersimpan emosional (penilaian) yang berbeda ketika kata-kata itu ketika diucapkan. Dalam hal ini, Maass bertujuan untuk menjelaskan bahwa apa yang dianggap oleh orang luar tentang Mentawai (termasuk dirinya) sebelum mengenal

Mentawai adalah “liar”, karena suasana masa kolonialisme/misi peradaban saat itu.

Kedua, dari kata “liar dan ramah” Maass mencoba membuat gimik (*gimmick*) yang bertujuan untuk mengelabui, baik dirinya maupun orang lain, tentang orang Mentawai. Konsep mengelabui merujuk pada sikap dan perilaku yang “liar”, kemudian diciptakan atau ditampilkan suasana yang “ramah” untuk mengelabui aktor (orang yang berkunjung atau bertemu dengan orang Mentawai). Apakah Maass ingin menyatakan bahwa jati diri sesungguhnya orang Mentawai hanyalah sebuah praduga belaka? Hal terpenting di sini adalah Maass sebagai lawan aktor dari orang Mentawai menangkap beberapa sikap gerak gerak “tipu daya” atau sikap menyakinkan bahwa mereka tidak “liar”, melainkan “ramah dan terbuka”. Pendapat Maas hanyalah sebuah mitos yang memberikan kekayaan budaya dan menghasilkan sebuah metafora. Mitos tidak harus dibuang karena dapat mengindahkannya tatanan kebudayaan.

Peter Kropotkin (1842-1921) dalam Schefold (2014) mengatakan “ketika seorang pria cerdas tinggal bersama suku terasing untuk jangka waktu lama, ia akan menggambarkan mereka sebagai ras yang “paling ramah” atau “paling mulia” di bumi,”. Pujian luar biasa itu akan kerap muncul tanpa perlu diperbincangkan lagi”. Terlebih lagi, sebagian anggota sukubangsa Mentawai khususnya yang berasal dari Siberut dan telah mendapatkan pendidikan di luar Mentawai menyatakan bahwa masyarakat Mentawai: 1) Masih terbelakang, 2) Perlu dibantu, 3) Tidak atau berusaha melepaskan dirinya dari istilah terbelakang dengan tidak menyatakan diri sebagai bagian dari masyarakat Mentawai (padahal dirinya adalah suku Mentawai).

Pada kenyataannya, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 telah menetapkan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satu-satunya kabupaten

tertinggal di Provinsi Sumatera Barat. Penetapan ini menandakan terbatasnya capaian pembangunan terkait perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Sehingga Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki visi “Mentawai yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”.

Masalah persinggungan antara komunitas adat dan laju modernisasi menjadi hal yang dekat dengan kajian antropologi. Masyarakat sebagai manusia memiliki kehidupan yang diatur oleh nilai-nilai leluhur, begitu juga dengan modernisasi dengan kaidah-kaidahnya yang membentuk sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. antropologi kritis yang melihat budaya secara *emic* dan pemaparan apa adanya berdasarkan masyarakat setempat yang mewujudkan budaya berdasar pada pengetahuan budaya yang ada dan berlaku. Hasilnya bisa berbeda dengan pengetahuan budaya pada masyarakat secara keseluruhan dalam konteks nasional atau provinsi. Pada masa lalu antropologi memandang secara subyektif yang mengarah pada eropasentris, sehingga sejak Frans Boas budaya harus dilihat dalam konteksnya dan masyarakatnya.

Oleh sebab itu, pandangan antropologi dapat digunakan untuk menganalisis fenomena antara masyarakat adat Mentawai dengan modernisasi yang mempengaruhi aspek sosial budaya penghidupannya⁷. Perspektif yang digunakan adalah interpretasi budaya (*cultural interpretive*) dan antropologi kritis (*critical anthropology*).

Perspektif teoritik interpretasi budaya dalam aliran antropologi budaya Amerika berupaya untuk menggali pandangan emik dari masyarakat yang berhubungan dengan persepsi, nilai-nilai, dan pengetahuan dari masyarakat setempat (kearifan lokal)

(Geertz, 1973). Kemudian, perspektif antropologi kritis (mazhab Frankurt) memiliki dua esensi utama yakni berkaitan dengan identitas dan masalah yang terdapat pada institusi kultural (Dermawan, 2013). Masalah identitas yang dimaksud adalah bagaimana manusia dipandang hanya s sebagai sebuah objek (Tasnur & Sudrajat, 2020). Masalah pada institusi kultural sering terjadi pada bidang agama dan pengembangan ilmu pengetahuan yang menyebabkan dikotomi perihal eksklusif dan inklusif. Teori kritis berusaha melakukan suatu perubahan yang mendasar dalam masyarakat dengan melakukan konstruksi terhadap tafsiran realitas dan berusaha melakukan pendekatan historis terhadap gejala peristiwa yang terjadi pada masyarakat (Afiff, 2022). Sifat dari teori ini juga menekankan pada peneliti untuk berpikir kritis, curiga terhadap realita, serta memperhatikan aspek historis.

Metode

Penelitian ini bersandar pada kajian pustaka yang dikumpulkan dari laman jurnal dan buku, dengan tujuan untuk untuk menelusuri dan menjelaskan pergulatan antara masyarakat adat yang menjadi objek dari modernisasi. Penelitian ini berusaha untuk melihat dinamika antara modernisasi dan tradisionalisasi yang saling memengaruhi; apakah modernisasi yang lebih mendominasi dan menghardik budaya lokal; atau sebaliknya, masyarakat mempertahankan identitas budaya mereka walaupun semakin lama semakin terdesak dalam gempuran modernisasi. Selain itu, data juga didukung dengan pandangan penulis yang selama kurang lebih lima tahun terakhir selama melakukan penelitian pada masyarakat Mentawai.

Menurut Laksono (2023) dalam pidato valediktorinya.

Kerja antropologi itu adalah menautkan gagasan atau imajinasi hidup

⁷ Perubahan yang terjadi pada masyarakat bisa berbentuk kemajuan (*progress*) dan dapat pula berupa kemunduran

di bidang-bidang tertentu kehidupan masyarakat tersebut (Malik, 2018).

berkomunitas kita sendiri dengan fakta etnografi dari liyan kita. Sehingga pengertian dan identitas baru tentang situasi diri (kemanusiaan) kita dapat terperikan. Bukanlah jalan keilmuan yang lurus, apalagi tanpa hambatan. Metodologinya nyaris tidak terpisahkan dari riwayat (subyektifitas) diri si antropolog, sehingga hanya dalam reflektifitasnya antropologi itu menyajikan kewaspadaan yang dapat mengubah sikap kita pada dunia.

Tampaknya merupakan tugas ganda antropolog untuk menyingkapkan struktur-struktur konseptual yang mengungkapkan tindakan-tindakan subjek kita, yang “dikatakan” dari perbincangan sosial dan juga mengkonstruksikan sebuah sistem analisis yang istilah-istilahnya bersifat generik terhadap struktur-struktur itu. Apa yang termasuk struktur-struktur itu karena itu adanya, akan berdiri berhadapan dengan determinan-determinan lain atas tingkah laku manusia. Tentu saja kebudayaan itu sendiri yang ditenun oleh manusia menjadi susunan lukisan etnografi yang mendalam dengan harapan memberikan kefasihan ilmiah atas peristiwa-peristiwa apa adanya. Tujuannya adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari yang khusus, tapi sangat penuh susunan fakta-fakta dan untuk mendukung pernyataan-pernyataan umum tentang peran kebudayaan dalam pembangunan kehidupan bersama dengan menggunakan pernyataan-pernyataan itu secara pasti dan seluk beluk yang kompleks

(Geertz, 1992). Kompleksitas itulah yang akan diamati dan ditelusuri keterkaitannya satu sama lain, khususnya masalah dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan perusahaan yang “mengambil alih lahan mereka”.

Hasil dan Pembahasan

Arat Sabulungan: Kepercayaan dan Budaya

Sebagai masyarakat adat, orang Mentawai memiliki pegangan hidup yang mereka sebut dengan *Arat Sabulungan*⁸. Pengaturan mengenai keseimbangan antara kedua alam yang terkandung dalam *Arat Sabulungan* ini memberikan penguatan bagi orang Mentawai untuk bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Ajaran *Arat Sabulungan* dianggap sebagai *mores*⁹ untuk membangun hubungan dengan alam, roh penguasa, sesama manusia, hewan, dan tumbuhan yang sama-sama memiliki jiwa (*magere*) untuk menciptakan hidup yang rukun dan berjalan *ajeg* (seimbang). Jika hubungan ini terganggu maka akan dilakukan ritual yang dipimpin oleh *sikerei*¹⁰ (*shaman*) supaya musibah dan penyakit yang dialami oleh orang Mentawai dapat di‘obati’. Pengobatan ini dilakukan melalui ritual adat (*punen*) yang dilakukan untuk menciptakan kembali keseimbangan (*equilibrium*) antara kedua kehidupan.

⁸ Terdapat beberapa definisi dari beberapa ahli tentang *Arat Sabulungan*. Menurut Coronese (1986) secara etimologi *Arat Sabulungan* terdiri dari kata *arat* yaitu adat/kepercayaan dan *sa* adalah sekumpulan/seikat serta *bulung* yaitu daun/dedaunan. Jadi *Arat Sabulungan* diartikan sebagai adat seikat dedaunan (Rudito & Sunarseh, 2013a; Schefold, 1991; Sihombing, 1979). Namun, menurut Tulus (2013) *Arat Sabulungan* dibentuk dari kata *sa* dan *bulungan*. *Sa* adalah kesatuan jamak dari sesuatu, akar kata *bulungan* adalah *bulu* yang berarti mempersembahkan. *Bulungan* dipahami sebagai sekelompok makhluk halus yang tidak dikenal. Maka dari itu, *sabulungan* berarti sekelompok roh, yang padanya diberikan persembahan khusus (*buluat*). Maka dari itu, *Arat Sabulungan* adalah kepercayaan yang berpusat pada keberadaan makhluk halus.

⁹ Tata kelakuan (cara berperilaku dan norma pengatur) yang bersandar pada kosmologi, kepercayaan, dan ideologi orang Mentawai yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi upacara, sakit, dan tabu.

¹⁰ *Sikerei* atau *kerey* adalah sebutan dan gelar yang diperoleh oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk memediasi antara alam nyata dan alam roh dengan upacara (Rudito, 2013a; Rudito & Sunarseh, 2013a). *Sikerei* sebagai *shaman* berarti menyediakan dirinya sebagai mediator antara dunia nyata dan gaib dalam pencarian obat, menyembuhkan penyakit kerasukan; *Sikerei* sebagai pemimpin upacara; *Sikerei* sebagai pengobat atau *sagailagek* meracik daun daunan untuk obat.

Praktik hidup komunal orang Mentawai dengan ritual *Arat Sabulungan* sebagai *pathology* modernitas mengakibatkan mereka direlokasi (Glossanto, 2023; Suparlan, 2019). Pola pemukiman *uma* (rumah komunal) orang Mentawai yang tersebar di lembah sungai menjadi penyatuan *uma-uma* di kampung relokasi adalah bentuk intervensi penguasa yang didasari oleh pandangan yang tidak 'netral' terhadap orang Mentawai. Dimulai sejak era kolonial Belanda dan diteruskan hingga era kekuasaan Orde Baru. Ide penggabungan *uma* dalam kampung relokasi dengan program yang bernama pembangunan selain untuk mengontrol orang Mentawai juga dimaksudkan untuk mengubah praktik-praktik hidup yang menjadi simbol 'keterbelakangan'. Selain relokasi, proyek keagamaan yang berlangsung di Mentawai juga menunjukkan konstruksi orang luar terhadap orang Mentawai dibangun atas penilaian diskriminatif dan bertujuan pada politik penataan etnis dari penguasa.

Pengaruh desakan agama dominan dari luar terhadap tradisi *Arat Sabulungan* dianggap sebagai budaya 'pemaksaan' (Delfi, 2012, 2013a; Schefold, 2001; Sihombing, 1979). Ditambah dengan adanya program pemukiman kembali di beberapa daerah di Mentawai dengan membangun perumahan dengan tipe dan bentuk rumah yang sama dan adanya tambahan rumah ibadah untuk agama tertentu. Pada tahun 1954 diadakan pertemuan tiga agama, yaitu Kristen Protestan, Islam, dan *Arat Sabulungan*.

Dalam rapat itu, ada dua (2) poin penting yang diperoleh yaitu:

1. Agama *Arat Sabulungan* harus dihapuskan secara paksa dengan bantuan polisi.
2. Dalam tempo 3 bulan, penduduk asli diberikan kebebasan untuk memilih agama Kristen Protestan atau Islam. Jika tidak dilakukan maka peralatan pemujaan *Arat Sabulungan* akan dibakar dan yang melaksanakan akan dihukum/penjara.

Rapat ini dilakukan di setiap kecamatan, yaitu di Muara Siberut, Muara Sikabalu, Sioban, dan Sikakap (Delfi, 2005). Intinya dalam rapat itu, *Arat Sabulungan* resmi dicabut¹¹ dan masyarakat Mentawai diharuskan memilih salah satu agama pada saat itu, yaitu: Kristen, Protestan atau Islam¹². Dengan penghapusan *Arat Sabulungan*, budaya Mentawai mulai terancam, karena struktur sosial dan agenda budaya di dasari dari konsep *Arat Sabulungan*¹³ (Delfi, 2005, 2012, 2013a). Oleh karena *Arat Sabulungan* merupakan esensi dari kebudayaan yang hakiki, perubahan ini terjadi karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berarti merombak mentalitas semua budaya yang ada di Kepulauan Mentawai (Coronese, 1986; Delfi, 2005; Yulia dkk., 2017, 2018). Selain itu, perubahan budaya bisa terjadi dari luar dan dari dalam masyarakat. Bukan semata-mata dari luar saja (seperti pemerintah) sedangkan pihak lainnya seperti agama sangat memegang peranan penting dalam perubahan *Arat Sabulungan*.

¹¹ Secara factual (*de facto*) keyakinan ini masih tetap dilaksanakan khususnya untuk upacara upacara besar dan juga pengobatan.

¹² Masuknya agama-agama di Mentawai memang memiliki rentetan panjang. Hal awal dikemukakan oleh Sihombing (1979) pada akhir abad-19 zending kristen Protestan yang berpusat di Jerman mengutus wakil-wakil untuk berkunjung ke Mentawai. Mereka melakukan penyelidikan melalui izin dan fasilitas dari pemerintahan Belanda waktu itu yang menguasai Indonesia. Sejak tahun 1901-1915 misi Kristen Protestan dan Katolik Roma mulai berjalan. Namun tujuannya belum dalam upaya

menyebarkan agama, tetapi zending-zending itu masih berorientasi pada pengobatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Delfi, 2005). Penyebaran agama dimulai dan dilakukan pengkristenan pada tahun 1901 oleh gereja Kristen Protestan yang dipimpin oleh Agust Lett dari Jerman yang berpusat di Sikakap. Misi Katolik Roma juga memulai debutnya sejak tahun 1954 yang dipimpin oleh Paderi Aurelio Canazaro, Frater Prero dan P. Angelo Calvi yang berpusat di Muara Siberut (Mardanas, 1992).

¹³ Dalam sebuah agenda adat, peran penting *Sikerei* dan *Sikebukut Uma (Rimata)* menjadi penting, antara penghubung roh dan pelaksana upacara.

Kelompok adat atau penganut agama tradisional seperti *Sikerei* tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif karena dianggap “non-religius”, sedangkan segala bentuk pelayanan publik seringkali menjadikan agama sebagai “kunci”. Artinya tanpa menyebut “agama resmi”, orang akan kesulitan memperoleh hak-hak sipil, seperti pelayanan untuk mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), catatan pernikahan, dan sebagainya. Berbagai diskriminasi hukum di atas dicoba untuk dihilangkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebenarnya, tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui, ataupun agama resmi dan tidak resmi di Indonesia. Kesalahpahaman ini terjadi karena Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1974 tentang pengisian kolom agama di KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang hanya mencantumkan lima agama. Namun, Keppres tersebut dibatalkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (2001-2002), karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama (Eindhoven, 2007; Sihombing, 1979).

Tetapi pada intinya upaya diskriminatif, pemaksaan, dan ketakutan pada pemeluk *Arat Sabulungan* di Siberut sampai saat ini masih terasa. Sehingga di bagian desa yang dekat dengan pesisir sudah jarang dilihat dan bahkan hampir tidak ada ritual, *sikerei*, dan *uma* yang masih menjalankan *Arat Sabulungan*. *Arat sabulungan* dan praktiknya dapat dilihat di bagian *hulu* yaitu pedalaman Siberut walaupun sudah terintegrasi pula dengan agama-agama resmi di Indonesia. Sehingga muncul anggapan bahwa *kapuaranan sasareu* atau agama orang luar adalah Kristen Protestan dan Islam, sedangkan *kapuaranan mentawai* atau agama Mentawai adalah *Arat Sabulungan* (Delfi, 2012).

Ruang Hidup: Hutan dan Penguasaan Lahan

Kehidupan orang Mentawai sangat bergantung pada hutan dan lahan tanah yang dapat dimanfaatkan dengan mudah. Sejak dari nenek moyang (*teteu siburuk*) hingga sekarang, generasi baru Mentawai menanam banyak tumbuhan di ladang dan kebun mereka. Dengan area hutan yang cukup luas, masyarakat Mentawai memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti tanaman gaharu, rotan, dan manau. Hutan, yang dalam bahasa masyarakat Mentawai disebut *leleu* merupakan jantung kehidupan bagi orang Mentawai. Hal ini tergambar dari bentuk *uma* yang panjang dan besar dengan semua materialnya yang diambil dari hutan. Peralatan, media pengobatan, makanan, dan tempat tinggal mereka bergantung pada hutan yang mereka percayai melalui *Taikaleleu* (penguasa hutan). Selain menjadi ruang hidup untuk orang Mentawai, hutan juga merupakan habitat kehidupan fauna dan flora. Namun, tingginya penggunaan dan pemanfaatan material hutan, hewan, dan tumbuhan oleh masyarakat Mentawai mengakibatkan terancamnya ketersediaan material hutan, sehingga dilakukan upaya konservasi hutan.

Selama Orde Baru (Orba) Indonesia, naiknya kapitalisme dan permintaan ekspor kayu memiliki dampak terhadap masyarakat Mentawai. Dampaknya berupa berkurangnya kawasan hutan. Penekanan wajah baru kapitalisme ini dilakukan melalui intervensi terhadap elemen-elemen penting kehidupan orang Mentawai.

Peruntukan dan penggunaan kawasan hutan oleh pihak swasta maupun pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain KSA (Kawasan Suaka Alam) atau KPA (Kawasan Pelestarian Alam) yang ditunjuk seluas ± 183.397 Ha termasuk Kawasan Taman Nasional Siberut (TNS) di Pulau Siberut. Peruntukan itu didasari oleh Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor K.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 147.213 Ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 9.906 Ha. Di Provinsi Sumatera Barat, Hutan Produksi (HP) yang ada di Pulau Siberut dikelola dalam bentuk IUPHHK-HA oleh PT. Salaki Summa Sejahtera (PT SSS) seluas $\pm$ 48.420 Ha sesuai SK. Menteri Kehutanan Nomor 413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, dicadangkan seluas $\pm$ 79.795 ha di Pulau Siberut (eks IUPHHK-HA Koperasi Andalas Madani) untuk IUPHHK-Restorasi Ekosistem kepada PT. Global Green melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.769/Menhut-VI/2009 tanggal 28 September 2009. Perusahaan penebangan kayu mulai bermunculan di seluruh Kepulauan Mentawai. Inilah awal dari perusakan hutan dan tradisi budaya lokal (Darmanto & Setyowati, 2012; Erwin dkk., 2019; Merari dkk., 2021; Mitchell & Tilson, 1986; Persoon & Schefold, 1985; Zakaria, 1996).

Pada tahun 2017, Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan izin prinsip IUPHHK-HTI berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) yang keluar tahun 2017 untuk PT. Biomass Andalas Energi (BAE) untuk menebang 20.030 ha hutan di Siberut Tengah dan Utara dan mengubahnya menjadi perkebunan Kaliandra¹⁴. Gubernur Sumbar kala itu, Irwan Prayitno turut mendukung dan mengeluarkan izin lingkungan seluas 19.876,59 ha, kemudian banyak kalangan yang menolak HTI tersebut. Namun, hingga saat ini PT BAE berjalan dan sudah melakukan *clearing land*. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 2019 PT BAE berhenti beroperasi hingga saat ini.

Hal ini dipicu oleh biaya operasional yang tinggi dan potensi produksi bahan baku yang kurang. Masuknya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam hutan dan mengeksploitasi hutan tidak hanya mengakibatkan kerusakan hutan tetapi juga mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial budaya orang Mentawai. Begitu juga dengan mengkonservasi hutan yang telah menghambat akses masyarakat adat Mentawai terhadap hutan yang menjadi tulang punggung kehidupan mereka. Hutan bukan hanya sebagai ruang hidup mereka tapi menjadi ranah adat yang diklaim berdasarkan narasi sejarah yang disebut tanah ulayat adat.

Keberlangsungan masyarakat adat tidak terlepas dari wilayah adat mereka. Pengakuan terhadap masyarakat adat perlu ditindaklanjuti dengan pengakuan wilayah adat, termasuk wilayah hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Penetapan Perda (Peraturan Daerah) PPUMA merupakan jaminan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Kepulauan Mentawai. Namun, pengakuan hutan adat dari pemerintah pusat yang belum juga dikeluarkan memberikan celah pada perusahaan kayu untuk merenggut lahan, sumber daya alam, dan budaya mereka. Maka dikeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan wilayah adat oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet sebagai implementasi dari Perda Kabupaten kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Adat.

Peralihan Tempat Tinggal dan Pangan

Masyarakat Mentawai mengalami semua bentuk penjajahan yang terjadi di Indonesia, mulai dari kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga pada akhirnya jatuh pada Pemerintahan Republik Indonesia yang merdeka tahun 1945.

¹⁴ Pembukaan hutan tanaman industri ini bertujuan untuk menghasilkan kayu pertukangan dan bahan baku energi baru terbarukan dalam bentuk *wood chips* dan *wood pellet* yang akan menggantikan batu bara sebagai energi

tidak bisa terbarukan. *Wood pellet* yang dihasilkan akan dipasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku untuk pembangkit listrik tenaga biomasa (Merari dkk., 2021; Sulthani, 2019; Syafrudin & Telaumbanua, 2021).

Kepulauan Mentawai mulai diakui menjadi bagian dari Indonesia sejak tahun 1950-an, di mana Mentawai dipimpin oleh seorang Wedana Koordinator yang bertanggung jawab langsung ke Gubernur KDH tingkat I Sumatera Barat (Delfi, 2005). Barulah pada tahun 1970-an daerah Mentawai berubah status menjadi daerah Otorita Proyek Khusus Kepulauan Mentawai (OPKM) atau Otorita Pengembangan Kepulauan Mentawai (sembilan tahun setelahnya) dengan tujuan meningkatkan pembangunan di Kepulauan Mentawai.

Rancangan pengembangan masyarakat Mentawai melalui intervensi Otorita Pengembangan Kepulauan Mentawai (OPKM) dan Departemen Sosial (Depsos) telah menciptakan pemukiman ‘baru’ bagi orang Mentawai. PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing) dianggap oleh pemerintah sebagai bentuk keterisolasian pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Darmanto, 2022; Irwandi & Erwin, 2022; Pradipta, 2019; Ridwan dkk., 2019). Rumah mereka dibangun dengan desain seragam di area yang dikategorikan di samping sungai atau pantai. Mereka dipaksa untuk meninggalkan *uma*¹⁵. Hal ini memunculkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep pemukiman itu. Istilah itu muncul dengan konsep *barasi*¹⁶ (kampung) yang sesungguhnya menjadi pondasi yang diwariskan oleh Belanda dalam pembangunan program pemukiman orang Mentawai. *Barasi* bertujuan untuk menggabungkan *uma-uma* yang terpisah supaya dapat dikoordinir dan terpusat.

Kemudian, program pemukiman kembali di Mentawai dinamakan *resettlement* untuk program pembangunan secara nasional.

Pembangunan rumah-rumah ini lebih mengacu pada rumah yang sama sekali berbeda dengan *uma* orang Mentawai. Setiap rumah memiliki satu kamar tidur, teras, dan ruang dapur. Program ini juga memberikan bantuan bibit tanaman dan alat-alat pertanian yang diinisiasi oleh Departemen Sosial wilayah Sumatera Barat saat itu. Program *resettlement* diperkenalkan oleh Belanda dan pemukiman ke daerah lain mempengaruhi kekuasaan wilayah secara adat dari klan asal wilayah yang bersangkutan, hal ini menyebabkan ladang asli orang yang pindah tersebut masih di tempat asalnya dan tidak bisa mengerjakan lahan di tanah *resettlement* karena milik marga lain.

Rumah-rumah *resettlement*¹⁷ ini adalah rumah yang dibangun oleh pemerintah sehingga harus mengikuti aturan pemerintah. Program ini termasuk ke dalam misi PKMT (Pembinaan Kembali Masyarakat Terasing) yang dimulai sejak tahun 1972 di Siberut (Delfi & Weintré, 2014a). Peruntukan *telemen* ini untuk membina ‘masyarakat terasing’ Mentawai dengan aturan-aturan pemerintah. Setelah itu, tahun 1979 terbit UU Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979. Maka dibentuklah kampung dengan nama-nama resmi. Terdapat 50 kampung yang ada di Siberut dan berada di wilayah administrasi Padang Pariaman (Delfi, 2005; Delfi & Weintré, 2014b). Setelah keluar UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Kepulauan Mentawai menjadi kabupaten sendiri di Sumatera Barat.

UU ini memberikan kewenangan pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk membentuk sistem pemerintahannya sendiri yaitu memakai

¹⁵ *Uma* adalah hubungan untuk upacara budaya, ritual, dan penyimpanan semua benda yang sakral (bermakna religius). *Uma* juga merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut seluruh kelompok dan tanah leluhur untuk pindah (Roza, 1997; Rudito, 2013b; Rudito & Sunarseh, 2013b).

¹⁶ *Barasi* ini berasal dari kata *barasiah* (dalam bahasa Minangkabau) yang digunakan orang Mentawai (Delfi,

2005; Tulus, 2013). Karena pada saat pemukiman dibangun, orang Mentawai dilarang untuk memelihara babi di dekat rumah karena ‘kotor’. Dengan tidak ada babi di pemukiman maka akan *barasiah* (bersih).

¹⁷ *Resettlement* atau orang Mentawai menyebutnya dengan *telemen*.

istilah Desa atau Nagari. Hal ini dikarenakan mereka termasuk dalam wilayah Sumatera Barat yang didominasi oleh Minangkabau, sehingga banyak kabupaten menamakan wilayah desa mereka dengan Nagari (Delfi, 2005, 2013b; Delfi & Weintré, 2014b). Pemerintahan *laggai* adalah bentuk pemerintahan yang berbasis *Arat Sabulungan* di Mentawai yang merujuk pada identitas etnik, agama, ras, dan asal usul yang terikat pada budaya untuk melakukan *self regulation* (Samaloisa, 2020). Akan tetapi, istilah *laggai*¹⁸ kurang cocok dipakai sebagai penamaan kampung karena dalam beberapa dialek memiliki makna yang negatif negatif, seperti dalam dialek *Sabirut* dengan arti alat kelamin. Akhirnya untuk menyelaraskan, maka digunakan sistem Desa, sehingga kampung-kampung hasil PKMT dan OPKM tadi dinamakan Desa dan Dusun.

Perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh program pemukiman membawa dampak negatif bagi pangan orang Mentawai. Sagu merupakan makanan utama orang Mentawai selain pisang (*maggok*) dan keladi/talas (*gettek*)¹⁹. Namun, setelah mereka dimukimkan, beras dikenalkan pada orang Mentawai. Tetapi jauh sebelum itu, menurut Delfi (2005) pengenalan beras bagi orang di Mentawai terjadi pada saat penguasaan Jepang. Orang Mentawai dipaksa menanam padi dan mengkonsumsinya. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah daerah mengeluarkan dekrit bahwa setiap pemuda yang ingin menikah harus menanam padi di

sebidang tanah. Hal ini diterapkan demi tujuan utama pemerintah yang menargetkan budidaya padi di desa-desa pesisir untuk meningkatkan indikator tingkat pembangunan dan bukti kinerja administrasi lokal (Persoon, 1992, hlm. 190). Pada tahun 1984, Indonesia adalah negara dengan populasi pertanian lebih dari 55% sehingga menjadi swasembada beras karena intervensi pemerintah yang disengaja.

Padi adalah sumber pangan nasional yang banyak digunakan, salah satunya dalam upacara adat oleh orang di pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Padi juga disimbolkan sebagai simbol kesuburan, kesejahteraan, persembahan/ritual, dan kekayaan. Selain itu, beras juga menjadi prasyarat dari 'peradaban'. Maka dari itu, orang yang tidak makan nasi dianggap rendah, miskin, dan tidak beradab (Erwin & Irwandi, 2023; Irwandi dkk., 2023a; Irwandi & Taufik, 2023). Ide utama peralihan sagu ke beras di Mentawai telah diucapkan oleh salah seorang misionaris Jerman tahun 1920-an, Börger, yang mengatakan bahwa dia percaya beras harus ditanam daripada sagu dan talas karena dianggap lebih bergizi dan menjadi simbol kekristenan, kemajuan, dan pembangunan (Persoon, 1992). Ditambah lagi, sagu dianggap sebagai 'kehidupan hutan', 'primitif', 'menghalangi kemajuan', dan 'makanan orang malas'.

Ini menjadi sebuah fenomena dalam kemajuan masyarakat dan kebodohan,

¹⁸ Terdapat istilah asli Mentawai untuk pengganti desa seperti *pulagajat* yang dimaknai sebuah *Uma* dengan beberapa *sapou*, ladang untuk obat-obatan dan juga pohon sagu. Sebuah *Pulagajat* terdiri dari sebuah *Uma* dan beberapa *sapou*, dan lahan sagu, keladi serta pisang serta adanya tumbuh-tumbuhan untuk keperluan obat serta upacara dan ini dikuatkan oleh adanya *kirekat* (pekuburan) dari klan si penguasa *pulagajat*. Satu *pulagajat* dipimpin oleh *Rimata* dan dibantu oleh dua orang *Sikaute* *Lulak* dalam urusan sosial budaya serta adanya seorang *Sikerey* sebagai pemimpin upacara.

¹⁹ Kebiasaan orang Mentawai adalah mengonsumsi sagu, pisang dan keladi sebagai makanan pokok dan ini sesuai

dengan ekosistem yang ada, sehingga pada empat bulan pertama mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok, kemudian mengonsumsi keladi 4 bulan berikutnya sebagai makanan pokok lalu buah pisang, pepaya pada 4 bulan berikutnya semua makanan tersebut yang diperlukan adalah karbohidratnya. Ketika diganti dengan padi atau beras sebagai makanan pokoknya, maka akan mengalami kesulitan (bukan budayanya) dan padi (nasi) mengandung karbohidrat dan gula yang tidak banyak diperlukan bagi orang Mentawai, (gula diperlukan untuk mengembalikan tenaga yang terkuras habis seperti masyarakat yang bersawah), dan juga mengandung lemak.

karena beberapa pemuda Mentawai dari daerah lain (yang sekolah di luar Mentawai) banyak menyatakan Mentawai tidak maju karena masih makan sagu. Transisi sagu ke beras menjadi sebuah permasalahan yang kompleks yang mengorbankan vegetasi rawa alami dan ladang sagu. Ditambah lagi, produksi pangan ini juga menyentuh aspek ekologi, agama, pemanfaatan lahan, eksploitasi sumber daya alam, serta pembagian dan penggunaan tenaga kerja. Produksi beras di Mentawai ini kerap kali gagal karena tidak memperhitungkan konteks sosial politik dan ekonomi orang Mentawai (Darmanto, 2022; Delfi, 2011; Persoon, 1992). Bagi orang Mentawai, sagu sebagai pangan bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, tetapi juga mengungkapkan hubungan kekuasaan dan identitas sosial, termasuk hubungan antara manusia dan alam serta antar manusia itu sendiri. Preferensi inilah yang menyebabkan pengembangan beras gagal diterapkan karena tidak memahami bahwa makanan adalah sesuatu fenomena sosiokultural di Mentawai (Erwin dkk., 2024; Irwandi dkk., 2023b).

Lingkungan alami orang Mentawai adalah rawa air tawar yang terbentang luas (Flach, 1983). Sagu tumbuh di sepanjang tepi aliran sungai dan dataran rendah berawa. Sedangkan padi memiliki hambatan pengembangan di Mentawai, diantaranya curah hujan yang tidak teratur, banyak hama, budaya bertani yang tidak dipahami, dan bertentangan dengan sosiokultural orang Mentawai (Azhari dkk., 2017; Ridwan dkk., 2019), sehingga pembudidayaan padi ini sangat beresiko tinggi bagi orang Mentawai.

Efek dari budidaya beras di Siberut menurut Persoon (1992) adalah

keterbatasan tenaga kerja. Lahan garapan bukan masalah, tetapi serapan tenaga kerja yang sedikit mengakibatkan penanaman padi yang terbatas, sehingga akan muncul minat untuk menanam tanaman komersial lainnya. Masalahnya Kepulauan Mentawai yang ditutupi hutan hujan tropis, menjadi rumah untuk spesies tumbuhan dan hewan endemik yang akan kehilangan nilai alamnya karena penebangan dan produksi tanaman komersial seperti cengkeh, kopra, kakao, pala, dan kopi. Inilah efek yang sedang terjadi saat ini dari peralihan sagu ke beras di Mentawai.

Modernisasi dan Identitas Budaya Mentawai

Selama Orde Baru (Orba), Indonesia melakukan intervensi terhadap orang Mentawai melalui program pembangunan. Pemerintah mulai mencampuri dan melarang sistem kepercayaan tradisional mereka (Sabaggalet, 2023; Yudas dkk., 2023; Yulia dkk., 2018). *Arat Sabulungan* yang telah dipraktikkan selama berabad-abad dan menjadi tulang punggung hubungan kehidupan sosial, budaya, dan magis (supranatural) digeser dan digantikan dengan kepercayaan baru (monoteisme). Dilihat dari aspek kerukunan dan tatanan kehidupan, mereka yang tinggal di *uma* dipaksa untuk pindah dan berkumpul dalam satu kawanan (berkelompok). Padahal, *uma* bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi ruang bagi orang Mentawai untuk melaksanakan agenda-agenda budaya dan hubungan sosial. Namun, hal itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat saat itu yang melarang praktik-praktik keagamaan berbasis animisme dan harus mengikuti agama resmi sesuai dengan konstitusi²⁰. Akan tetapi, orang Mentawai

²⁰ Menurut Sihombing (1979) pada akhir abad 19 zending kristen Protestan yang berpusat di Jerman mengutus wakil-wakil untuk berkunjung ke Mentawai. Mereka melakukan penyelidikan melalui izin dan fasilitas dari pemerintahan Belanda waktu itu yang menguasai Indonesia. Sejak tahun 1901-1915 misi Kristen Protestan

dan Katolik Roma mulai berjalan. Namun, tujuannya belum dalam upaya menyebarkan agama, tetapi zending-zending itu masih berorientasi pada pengobatan, pendidikan dan kesejahteraan (Delfi, 2012, 2013a; Glossanto, 2023; Islami dkk., 2023; Yolanda & Willis, 2018). Penyebaran agama dimulai dan dilakukan

tetap melaksanakan praktik kepercayaan mereka sebagai bagian dari kehidupan (kebudayaan) mereka. Akibatnya, yang melantunkan lagu-lagu (*urai*) nenek moyang dipukuli polisi, alat-alat ritual kebudayaan mereka dibakar, dan bertato menjadi hal yang ditabukan (Yulia dkk., 2017). Sisi lain dari aspek ekologi adalah lingkungan hutan yang menjadi sumber kehidupan dibabat dengan semena-mena (*illegal logging* dan konsesi) (Delfi dkk., 2022). Mereka yang melindungi hutan, akhirnya dipenjara. Sampai pada akhirnya, pengaruh dari luar Mentawai adalah program resettlement atau pemukiman kembali karena diperlukan persebaran tempat tinggal untuk diusahakan dapat berubah secara alami dengan adanya percampuran dengan orang luar. Dari dalam masyarakat terjadi perselisihan yang kerap terjadi sehingga akan terusir dari wilayah suku atau klannya untuk menuju ke wilayah lain di luar klannya.

Mereka dipengaruhi oleh desakan modernisasi yang dibawa oleh program pembangunan, sehingga mereka gamang dengan identitas dirinya. Seolah-olah program pembangunan sejalan dengan keinginan orang Mentawai dan tidak bertentangan dengan kebudayaan yang selama ini mereka 'agungkan'. Isu pembangunan dan isu kementawaian, sama halnya dengan modernisasi dan identitas budaya, kurang tepat dipandang oleh pengambil kebijakan yang menerjemahkannya dalam bentuk proyek pembangunan. Hal ini terlalu dalam mengintervensi sendi-sendi kehidupan orang Mentawai demi delusi 'kemajuan', demi 'keberadaban', dan demi 'mengentaskan kemiskinan'. Pada kenyataannya, hingga saat ini angka

statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan tahun 2022 di Mentawai masih tinggi yaitu 13,97% serta berdasarkan Perpres No. Nomor 63 Tahun 2020-2024 dikategorikan daerah 'tertinggal'. Apa sebenarnya tujuan dari pembangunan, dan apa dampaknya terhadap kehidupan orang Mentawai.

Program pembangunan yang dilakukan di Mentawai telah banyak mempengaruhi elemen kehidupan orang Mentawai. Program pembangunan dan hegemoni dari pemerintah telah mengganggu identitas budaya orang Mentawai. Identitas kultural orang Mentawai 'bias' dari jati diri mereka karena 'kaca' modernisasi.

Beruntung pada saat ini dapat kita lihat praktek budaya masih dijalankan karena ada peran *Sikerei* yang tetap secara konsisten menjaga kebiasaan dan budaya secara fisik dan non fisik bagi masyarakat Mentawai. Sistem keyakinan *Arat Sabulungan* masih dilaksanakan oleh *Sikerei* walaupun banyak pemuda-pemuda Mentawai yang sudah beragama samawi dan kehidupan modern hanya menjadi peserta dari upacara yang dipimpinnya.

Simpulan

Menjadi manusia tentu berbudaya. Budaya memiliki sifat yang dinamis dan begitu juga dengan manusia sebagai perangkatnya. Keberadaan masyarakat adat di era modernisasi justru mengalami pergumulan, di mana satu sisi mempertahankan identitasnya yang menjadi kunci kehidupan mereka., sementara di sisi lain, modernisasi dengan arus yang sangat kencang, tidak bisa memilah-milah sungai mana yang dilaluinya. Sehingga, kebudayaan terseret jauh dan masyarakat kehilangan jati dirinya. Modernisasi dan identitas budaya

pengkristenan pada tahun 1901 oleh gereja Kristen Protestan yang dipimpin oleh Agust Lett dari Jerman yang berpusat di Sikakap. Misi Katolik Roma juga memulai

debutnya sejak tahun 1954 yang dipimpin oleh Paderi Aurelio Canazaro, Frater Prero, dan P. Angelo Calvi yang berpusat di Muara Siberut (Mardanas, 1992).

saling memunculkan dualitas. Walaupun program pembangunan yang dilakukan pada orang Mentawai yang telah berlangsung sejak lama masih menyisakan puing-puing unsur budaya yang masih dijalankan, tetapi hal itu pula yang membuat masyarakat berada dalam kegamangan. Budaya sangat penting untuk dipertahankan, tetapi sangat menarik untuk dirubah. Budaya bersifat statis karena dipakai untuk memahami lingkungan dan mengatur tingkah laku manusia, dan budaya bersifat dinamis karena manusia mempunyai ide dan inovasi dan juga adanya pengaruh dari luar masyarakat. Jadi budaya tidak perlu dan tidak bisa dipertahankan, harus bersifat adaptif untuk mengantisipasi perubahan dari dalam dan dari luar masyarakat. Oleh sebab itu, tarik menarik antara budaya dan modernisasi meninggalkan bekas luka masing-masing.

Budaya mulai, dan akan terus terkikis dan bergeser ke arah bagaimana cara orang Mentawai mempertahankan hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Modernisasi semakin mendesak, ke urat nadi orang Mentawai yang mau tidak mau harus mengikutinya. Pada akhirnya, modernisasi melalui program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan melumpuhkan kebudayaan orang Mentawai. Budaya akan kalah dan tunduk pada modernisasi dalam ring pergulatan ini.

Ucapan Terima kasih

Terima kasih kepada dosen saya Maskota Delfi, Ermayanti, Edi Indrizal dan Erwin yang selama ini mendukung kegiatan saya di Mentawai.

Daftar Pustaka

Afiff, S. (2022). Antropologi dan Persoalan Perubahan Iklim: Perspektif Kritis Ekologi Politik. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 24(1), 109.

<https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p109-118.2022>

Andalas, E. F. (2018). Meninjau Kembali Identitas Budaya Jawa di Era Globalisasi: “Panji” sebuah Representasi Identitas Lokal Jawa timur. *Budaya Jawa dalam Tantangan Globalisasi dan Pengembangan Budaya Nasional*.

Aprianti, M., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2022). Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi Terhadap Identitas Nasional Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 996–998. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2294>

Atsani, U., Fitri, H., & Efendi, R. (2021). Perlindungan Hak Keperdataan Penghayat Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47(2), 207–220.

Azhari, R., Rusman, B., Kasim, M., Syarif, A., Reflinaldon, R., Yasin, S., Zainal, A., & Junaidi, J. (2017). Tantangan Pengembangan Padi Dikabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal AGRISEP*, 16(1), 41–56. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.16.1.41-56>

Bakker, L. (2007). Foreign images in Mentawai: Authenticity and the exotic. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 163(2–3), 263–288. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003686>

Comte, A. (2009). *The Positive Philosophy of Auguste Comte* (H. Martineau, Penerj.; 1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511701467>

Coronese, S. (1986). *Kebudayaan Suku Mentawai*. Grafidian Jaya.

- Dalidjo, N. (2021, Agustus 30). *Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat*. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. <https://aman.or.id/news/read/1267>
- Daraiseh, I. (2021). History, Modernity, and Marginal Cultural Identity in Theeb and Beasts of the Southern Wild. *The Journal of Popular Culture*, 54(4), 790–810. <https://doi.org/10.1111/jpcu.13048>
- Darmanto. (2011). Konservasi Global, Taman Nasional dan Praktek Lokal di Pulau Siberut, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jik.582>
- Darmanto. (2022). Good to Produce: Food, gardening, and valued persons in contemporary Mentawai society, Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 50(148), 289–312. <https://doi.org/10.1080/13639811.2022.2089479>
- Darmanto. (2023). ‘Rice ambiguity’ and the taste of modernity on Siberut Island, Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 54(1), 64–88. <https://doi.org/10.1017/S0022463423000188>
- Darmanto, & Setyowati, A. B. (2012). *Berebut hutan Siberut: Orang Mentawai, kekuasaan, dan politik ekologi* (Cetakan Pertama). KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerja sama dengan Unesco.
- Delfi, M. (2005). *Dari desa ke Laggai: Resistensi dan identitas orang Mentawai di Muntei, Siberut Selatan, Sumatera Barat* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/27616>
- Delfi, M. (2011, Oktober 29). *White rice or black sago? - Inside Indonesia: The peoples and cultures of Indonesia*. Inside Indonesia. <https://www.insideindonesia.org/edition-106/white-rice-or-black-sago>
- Delfi, M. (2012). Sipuisilam dalam Selimut Arat Sabulungan Penganut Islam Mentawai di Siberut. *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 1–34.
- Delfi, M. (2013a). Islam and Arat Sabulungan in Mentawai. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 51(2), 475–499. <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.51.2.475-499>
- Delfi, M. (2013b). *Kaipa Pulaggajatnu: Wacana Kementawaian di Bumi Sikerei* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/66571>
- Delfi, M. (2018). Food Sovereignty of Communities in the Margins of the Nation: Staple Food and Politics in Mentawai, West Sumatra. *Proceedings of Social Sciences, Humanities and Economics Conference (SoSHEC 2017)*. Social Sciences, Humanities and Economics Conference (SoSHEC 2017), Surabaya, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/soshec-17.2018.32>
- Delfi, M., Arifin, Z., & Pujiraharj, S. (2022). The Environment From an Indigenous Perspective in Mentawai Indonesia. Dalam *Book Chapters on Asian Network and Social Change* (hlm. 203–225). Research and Community Service Institution Univesitas Negeri Semarang.
- Delfi, M., & Weintré, J. (2014a). A Journey in Indonesian Regional Autonomy: The Complications of “Traditional” Village Revival in Mentawai, West Sumatra. *Social Transformations: Journal of the Global South*, 2(2), 3. <https://doi.org/10.13185/1957>
- Delfi, M., & Weintré, J. (2014b). Mentawai Demographic Transition: From Upstream “Uma” to Settlement and

- Sago to Rice Consumption. *The International Journal of Sustainability in Economic, Social and Cultural Context*, 9(3), 37–52. <https://doi.org/DOI:10.18848/2325-1115/CGP/v09i03/55236>
- Dermawan, A. (2013). Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 325–339. <https://doi.org/10.14421/jsr.v8i1.1921>
- Duncan, C. R. (Ed.). (2008). *Civilizing the Margins: Southeast Asian Government Policies for the Development of Minorities*. NUS Press.
- Eindhoven, M. (2007). New colonizers?: Identity, representation and government in the post-New Order Mentawai Archipelago. Dalam *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. BRILL. <https://doi.org/10.1163/9789004260436>
- Eindhoven, M. (2009). The Influences of History and Politics on Environmental and the Future of the Mentawai Archipelago. Dalam *Island Environmental Histories and Management in the Asia-Pacific Region*, *Asia-Pacific Forum* (hlm. 55–82). Center for Asia Pacific Area Studies, RCHSS, Academia Sinica.
- Erwin. (2017). Ketahanan Pangan Rumah Tangga dan Wilayah Berbasis Pangan Lokal Sagu, Keladi, dan Pisang di Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa-Kota*, 373–380.
- Erwin, E. (2022). *Pembangunan dan Kemiskinan Pada Masyarakat Mentawai*. Andalas University Press.
- Erwin, E., & Irwandi, A. (2023). Sago and Rice are Ambiguous: Food Security Under the Food Hood of Development Discourse in Mentawai Islands. *Sosial Budaya*, 20(2), 147. <https://doi.org/10.24014/sb.v20i2.23677>
- Erwin, E., Irwandi, A., & Ermayanti, E. (2024). Food Security Dilemma and Development Discourse in Mentawai Islands. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian*, 9(3), 233–242. <https://doi.org/10.37149/jimdp.v9i3.1049>
- Erwin, E., Irwandi, A., & Mitra, R. (2022). Mukop Sagai: Menakar Kedaulatan Pangan Orang Sarereiket di Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2). <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.29282>
- Erwin, E., Isnarti, R., & Putri, A. (2019). Assessment and Empowerment of Poverty through Local Value in Mentawai Islands. *Proceedings of the International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law*. International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, Padang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.5-9-2018.2281077>
- Erwin, E., Mitra, R., & Irwandi, A. (2023). Availability and Pride of Mentawai Ethnic Communities for Local Food on Sipora Island. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian*, 8(1), 11–18. <https://doi.org/10.37149/jimdp.v8i1.249>
- Fakih, M. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. INSISTPress and Pustaka Pelajar.
- Flach, M. (1983). *The Sagopalm: Domestication, Exploitation and Products*. FAO.

- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures Selected Essays*. Basic Books.
- Geertz, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Kanisius.
- Glossanto, K. (2023). Sabulungan dalam Tegangan Identitas Budaya: Kajian atas religi orang Mentawai di Siberut Selatan. *Retorik: Jurnal Ilmu Humaniora*, 8(1), 10–23. <https://doi.org/10.24071/ret.v8i1.4671>
- Habibah, S. M., & Fauzi., M. A. N. (2021). Pengakuan Hak Masyarakat Adat Mentawai Sebagai Penegakan Asas Kemanusiaan Warga Negara Indonesia The Recognition Of Mentawai. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47(2).
- Hammons, C. S. (2010). *Sakaliou: Reciprocity, Mimesis, and the Cultural Economy of Tradition in Siberut, Mentawai Islands, Indonesia* [Dissertation]. University of Southern California.
- Ika, R. (2013). *Kehidupan Arat Sabulungan dalam Masyarakat Tradisional Mentawai* [Other, Universitas Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu>
- Irwandi, A., & Erwin, E. (2022). Pangan Lokal Non Beras: Ketahanan Pangan Rumah Tangga pada Era Pandemi Covid-19 di Mentawai. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 6(1), 101–113. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5013>
- Irwandi, A., Erwin, Ermayanti, & Indrizal, E. (2023a). Ketahanan Pangan Orang Mentawai di Bawah Tudung Saji Pembangunan. Dalam S. Widowati & R. A. Nurfitriani (Ed.), *Diversifikasi Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.918.c795>
- Irwandi, A., Erwin, Ermayanti, & Indrizal, E. (2023b). Ketahanan Pangan Orang Mentawai di Bawah Tudung Saji Pembangunan. Dalam S. Widowati & R. A. Nurfitriani (Ed.), *Diversifikasi Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.918.c795>
- Irwandi, A., & Saleleubaja, K. I. (2021). Dari Sagu Ke Beras: Perubahan Kehidupan Sosial Budaya Orang Mentawai. *Masyarakat Indonesia*, 47(2), Article 2. <https://doi.org/10.14203/jmi.v47i2.985>
- Irwandi, A., & Taufik, R. (2023). Cultural Identity in the Shackles of Modernization: The Case of Mentawai Indigenous Peoples. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(2), 211–228. <https://doi.org/10.25077/jsa.9.2.212-229.2023>
- Islami, M. Z., Nisa, A. K., Fitri, N. A., Wajdi, M. F., Situmorang, K., Sartini, S., & Selamat, I. L. B. (2023). Arat Sabulungan as A Sacred Ecology: Sustainable Consumption and Climate Change Adaptation Among the Mentawai Tribe. *Sosial Budaya*, 20(1), 24. <https://doi.org/10.24014/sb.v20i1.22248>
- Jemadu, A. (2003). Pembangunan Dan Modernisasi: Implikasinya Terhadap Tatanan Ekologi Dan Sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), Article 2. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1527>
- Kahn, J. S. (2016). *Kultur, Multikultur, Postkultur: Keragaman Budaya dan Imperialisme Kapitalisme Global* (Taufiq Hakim, Ed.; Muhammad

- Muhibbuddin, Penerj.; 1 ed.). Institute of Nation Development Studies.
- Laksono, P. M. (2023). *Siap Kejut*.
- Larasati, D. (2018). Globalization on Culture and Identity: Pengaruh dan Eksistensi Hallyu (Korean-Wave) Versus Westernisasi di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i1.8749>
- Lee, M. M. (2020). *Crippling Leviathan: How Foreign Subversion Weakens the State*. Cornell University Press.
- Li, T. M. (2002). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. Duke University Press.
- Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822376460>
- Li, T. M. (2018). *Evidence-based options for advancing social equity in Indonesian palm oil: Implications for research, policy and advocacy*. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/006842>
- Liliweri, A. (2002). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. PT LKis Pelangi Angkasa.
- Liliweri, A. (2003). *Perspektif Teoritis, Komunikasi Antar Pribadi: Suatu Pendekatan ke Arah Psikologi Sosial Komunikasi*. Citra Adhitya Bakti.
- Malik, A. (2018). *Identitas Kultural dan Interaksi Sosial Masyarakat Adat di Tengah Modernisasi (Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul)*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/jhdet>
- Mardanas, I. (1992). *Adat dan Upacara Perkawinan Mentawai*. Pengembangan Media Kebudayaan Jakarta.
- Merari, G., Sanene, P., & Sagurung, B. (2021, Oktober 15). *Indigenous groups in Mentawai Islands resist the exploitation of their territories*. Ekuatorial. <https://www.ekuatorial.com/en/2021/10/indigenous-groups-in-mentawai-islands-resist-the-exploitation-of-their-territories/>
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. Sage.
- Mitchell, A. J., & Tilson, R. L. (1986). *Restoring the Balance: Traditional Hunting and Primate Conservation in the Mentawai Islands, Indonesia*. Dalam *Primate Ecology and Conservation* (Vol. 2, hlm. 249–260). Cambridge University Press.
- Mitra, R., & Erwin, E. (2022). ETNIS MENTAWAI DAN KONDISI KETAHANAN PANGAN LOKAL PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Aceh Anthropological Journal*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.29103/aaj.v6i1.5782>
- Mulyono, M. (2017). The Problems of Modernity and Identity in Globalization Era. *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 1(2), 106–111. <https://doi.org/10.14710/jmsni.v1i2.1819>
- Persoon, G. (1992). From Sago To Rice: Changes in Cultivation in Siberut, Indonesia. Dalam E. Croll & D. J. Parkin (Ed.), *Bush base: Forest farm: Culture, environment, and development*. Routledge.
- Persoon, G., & Schefold, R. (1985). *From Sago To Rice: Changes in Cultivation*

- in Siberut, Indonesia*. Bhratar Karya Aksara.
- Pradipta, L. (2019). Peralihan Pangan Pokok Dari Sagu ke Beras: Sebuah Kajian Ketahanan Pangan dan Masyarakat Adat. *Society*, 7(1), 37–47.
<https://doi.org/10.33019/society.v7i1.76>
- Putri, R. C. R. W. (2018). Identitas Dan Budaya Pada Masa Kini: Keuntungan Globalisasi Dan Ancaman Homogenisasi. *ULTIMART Jurnal Komunikasi Visual*, 9(1), 7–13.
<https://doi.org/10.31937/ultimart.v9i1.733>
- Reeves, G. (1999). History and 'Mentawai': Colonialism, Scholarship and Identity in the Rereiket, West Indonesia. *The Australian Journal of Anthropology*, 10(1), 34–55.
<https://doi.org/10.1111/j.1835-9310.1999.tb00011.x>
- Ridwan, R., Effendi, N., Tanjung, F., & Asmawi, A. (2019). The Success and Failure of New Rice Fieldprint Program in Mentawai Island Regency. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 9(6), 2055–2059.
<https://doi.org/10.18517/ijaseit.9.6.9723>
- Roza, J. (1997). *Uma dalam Kehidupan Masyarakat Mentawai di Sumatera Barat* [Tesis]. Universitas Padjadjaran.
- Rozi, S., & Taufik, Z. (2020). Adaptation of Religion and Local Wisdom in Global Environmental Issues in Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 4(3), 191–203.
<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i3.9593>
- Rudito, B. (2013a). *Bebetel Uma Kebangkitan Orang Mentawai: Sebuah Etnografi*. Gading dan Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD).
- Rudito, B. (2013b). *Bebetel Uma Kebangkitan Orang Mentawai: Sebuah Etnografi*. Gading dan Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD).
- Rudito, B., & Sunarseh. (2013a). *Masyarakat & Kebudayaan Orang Mentawai*. UPTD Museum Nagari.
- Rudito, B., & Sunarseh. (2013b). *Masyarakat dan Kebudayaan Orang Mentawai*. UPTD Museum Nagari.
- Sabaggalet, Y. (2023). Dinamika Kapital Sosial dan Budaya Uma dalam Pembangunan Berkelanjutan di Pulau Siberut. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 25(1), 117.
<https://doi.org/10.25077/jantro.v25.n1.p117-129.2023>
- Sabaggalet, Y., Helmi, H., & Elfindri, E. (2021). Pengaruh Budaya Luar Terhadap Pola Pemukiman Uma dan Kehidupan Sosial Ekonomi Lokal Mentawai. *Masyarakat Indonesia*, 47(2), Article 2.
<https://doi.org/10.14203/jmi.v47i2.1106>
- Saleleubaja, K. I. (2020). *Kineiget Mukop Bera' Perubahan Pola Konsumsi Makanan Pokok Pada Masyarakat Mentawai (Studi Kasus: Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai)* [Diploma, Universitas Andalas].
<http://scholar.unand.ac.id/60783/>
- Samaloisa, R. (2020). Pemerintahan Laggai Paham Barat Sabulungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(1), 84–110.
<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.82>
- Samaloisa, R., Ahmad, M., Qudus, A. A., & Tatubeket, H. N. (2023). Tinungglu's Governing: Traditional Food Buffer

- System in Mentawai as Governance. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 4(1), layouting.
<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v4i1.299>
- Satria, R. (2020). *DISRUPSI: Dinamika kehidupan Masyarakat Mentawai di Tengah Modernisasi Authors*. LIPI PRESS.
<https://doi.org/10.14203/press.268>
- Schefold, R. (1985). Kebudayaan Tradisional Siberut. Dalam G. Persoon & R. Schefold (Ed.), *Pulau Siberut*. Bhratara Karya Aksara.
- Schefold, R. (1991). *Mainan bagi roh kebudayaan Mentawai*. Balai Pustaka.
- Schefold, R. (1998). The domestication of culture; Nation-building and ethnic diversity in Indonesia. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 154(2), 259–280.
<https://doi.org/10.1163/22134379-90003898>
- Schefold, R. (2001). Three sources of ritual blessings in traditional Indonesian societies. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 157(2), 359–381.
<https://doi.org/10.1163/22134379-90003812>
- Schefold, R. (2014). *Aku dan orang Sakuddei: Menjaga jiwa di rimba Mentawai*. Kompas Media Nusantara.
- Sihombing, H. (1979). *Mentawai*. Pradnya Paramita.
- Sulthani, A. F. (2019). Proses Agenda Setting Kebijakan Hutan Adat Di Kabupaten Mentawai. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 67–73.
<https://doi.org/10.25077/jakp.4.1.67-73.2019>
- Suparlan, T. S. (2019). *Berlabuh di Bumi Sikerei*. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suryandari, N. (2017). Eksistensi Identitas Kultural di tengah Masyarakat Multikultur dan Desakan Budaya Global. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 21.
<https://doi.org/10.21107/ilkom.v11i1.2832>
- Susanto, N. H. (2018). Infiltrasi Globalisasi Terhadap Identitas Budaya dan Pendidikan Karakter Negara Berkembang. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 47(2), Article 2.
<https://doi.org/10.15294/lik.v47i2.15291>
- Syafrudin, I., & Telaumbanua, R. (2021). Gerakan Perlawanan atas Penguasaan Sumber Daya Hutan Masyarakat Adat Mentawai di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(1), 1–7.
<https://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.21386>
- Tasnur, I., & Sudrajat, A. (2020). Teori Kritis: Perkembangan dan Relevansinya Terhadap Problematika di Era Disrupsi. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 6(1), 33.
<https://doi.org/10.24235/jy.v6i1.5894>
- Tulius, J. (2013). Family stories: Oral tradition, memories of the past, and contemporary conflicts over land in Mentawai – Indonesia. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 15(1), 180.
<https://doi.org/10.17510/wjhi.v15i1.110>
- Weintré, J. (2006). *Perubahan Sosial di Mentawai Penyesuaian Diri Pada Marginalitas dan Ekonomi Uang: Studi Kebudayaan dan Sejarah Masyarakat Mentawai di Sumatera*

Barat [Thesis]. Universitas Negeri Semarang.

Yolanda, F., & Willis, R. (2018). *Kearifan Lokal Arat Sabulungan Dalam Pengelolaan Hutan (Studi Kasus Hutan Adat Suku Saerajen dan Suku Samongilailai di Desa*. 2(3).

Yudas, Y., Helmi, H., Elfindri, E., & Asrinaldi, A. (2023). The Influence of Foreign Cultural Discourse on the Uma Settlement in Mentawai, Indonesia. *Journal of Pragmatics and Discourse Research*, 3(1), 70–80. <https://doi.org/10.51817/jpdr.v3i1.357>

Yulia, R., Kaksim, & Zulfa. (2017). Dampak Tato dalam Tradisi Arat Sabulungan: Studi Kasus Masyarakat Desa Sioban Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. *Prosiding Seminar Nasional Edukasi 2017: Semnas Bio-Edu*. Semnas Bio-Edu, Padang, West Sumatera, Indonesia.

Yulia, R., Zulfa, Z., & Naldi, H. (2018). Improving the Government Policy on the Arat Sabulungan Tradition in Mentawai Islands. *TAWARIKH*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.2121/tawarikh.v10i1.1060>

Yuniarto, P. R. (2021). Nilai Budaya dan Identitas Kolektif Orang Suku Mentawai dalam Paruruk, Tulou, dan Punen. *Masyarakat Indonesia*, 47(2), Article 2. <https://doi.org/10.14203/jmi.v47i2.1107>

Zakaria, R. Y. (1996). Pembangunan Yang Melumpuhkan: Pelajaran Dari Kepulauan Mentawai. Dalam S. Djuweng (Ed.), *Kisah dari kampung halaman: Masyarakat suku, agama resmi, dan pembangunan* (Cet. 1). Interfidei.